

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang sosial masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra pernah dilakukan oleh Dewi Wulandari dari Universitas Surabaya pada tahun 2010. Penelitiannya berjudul *Novel Memang Jodoh Karya Marah Rusli dan Persiden Karya Wisran Hadi (Kajian Sosiologi Sastra Alan Swingewood)*. Di dalam penelitian tersebut dipaparkan analisis tentang struktur sosial, konflik sosial, dan perubahan sosial masyarakat Minangkabau. Wulandari menganalisis kedua novel tersebut berdasarkan pendapat Swingewood. Disebutkan bahwa sosiologi adalah studi objektif tentang manusia dalam masyarakat, tentang lembaga sosial, dan proses sosial. Sedangkan sastra dikatakan sangat terkait dengan kehidupan manusia, cara beradaptasi, dan keinginannya untuk melakukan perubahan. Berdasarkan pernyataan di atas dikatakan bahwa sosiologi dan sastra memiliki kesamaan dalam objek yang dibicarakan, yakni manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta segala aspek yang terkait dengan masyarakat tersebut.

Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, Wulandari berusaha mendeskripsikan struktur sosial, konflik sosial, dan perubahan sosial yang terdapat dalam kedua novel tersebut, khususnya yang terkait dengan masyarakat Minangkabau. Temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut mencakup tiga hal. Pertama, struktur sosial masyarakat Minangkabau terdiri atas kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, dan kekuasaan. Kedua, konflik kelas sosial di masyarakat Minangkabau terjadi antara mamak dan kemenakan. Ketiga, perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau meliputi perubahan pada kekuasaan bundo kanduang, adat sopan santun, pola pikir tentang adat perkawingn, kekuasaan ninik mamak, hak kepemilikan harta kakayaan, kedudukan urang sumando, kepemimpinan kepala kaum, dan aturan hubungan dengan orang banyak.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Weni Nur Pratiwi dari Program Studi Bahasa Jawa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013. Dia mengambil judul *Stratifikasi Sosial dan Pengaruhnya Pada Pesan Moral dalam Novel Kunarpa Tan Bisa Kandha Karya Suparto Brata*. Dalam penelitian ini Pratiwi menggunakan teori stratifikasi sosial Soerjono Soekanto sebagai pisau utama. Adapun masalah yang dikaji terdiri atas dua kriteria. Yakni, stratifikasi sosial berdasarkan politik yang dilihat dari profesi dan berdasarkan kultur yang dilihat dari tingkat pendidikan.

Berdasarkan analisisnya didapat temuan bahwa profesi yang terdapat dalam novel *Kunarpa Tan Bisa Kandha* terdiri atas tiga lapisan. Mereka terbagi menjadi golongan atas, menengah, dan bawah. Golongan atas terdiri atas camat, kepala administrasi, detektif, dan pengusaha. Golongan menengah meliputi dokter, insinyur, pegawai PU, pegawai pemda, pegawai kantor, dan pegawai swasta. Adapun golongan bawah terdiri atas pembantu rumah tangga, blantik sapi, dan makelar motor. Sementara kajian berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, masyarakat di dalam novel tersebut digolongkan menjadi empat, yaitu tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pesan moral yang terdapat dalam novel *Kunarpa Tan Bisa Kanda* yaitu seseorang harus tawakal dan tidak putus asa agar sesuai dengan kedudukan yang sedang ditempati. Mereka harus bersabar dengan kondisi yang saat ini dijalani.

Penelitian yang agak berbeda dilakukan Febrian Fatma Melati berjudul "Dinamika Perubahan Sosial dan Budaya di Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang". Penelitian tersebut dimuat di jurnal *Antro Unair DotNet*, Vol.2/No.1/Jan.-Pebruari 2013 halaman 291-297. Penelitian tersebut hanya memfokuskan kajian pada perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Desa Kendalsari. Perubahan tersebut terjadi karena adanya faktor eksternal setelah PT Berdikari membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Kehadiran industri aluminium terbesar di Desa Kendalsari itu memberikan dampak bagi budaya masyarakat desa tersebut. Mata pencaharian, gaya hidup, dan keadaan ekonomi rumah-tangga mereka ikut berubah. Begitu pula pola pikir, pandangan hidup, dan solidaritas antar tetangga atau antar manusianya.

Masyarakat yang sebelumnya lebih banyak berprofesi sebagai petani kini sebagian menjadi buruh pabrik. Mereka yang sebelumnya bekerja di ladang, berganti menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut. Karena pendidikan mereka pada umumnya setingkat SD sampai dengan SMA, secara tidak langsung hal itu memengaruhi kedudukan masing-masing di perusahaan.

Bila dibandingkan dengan ketiga penelitian yang sudah dilakukan tersebut, dalam penelitian ini berbeda, baik dari aspek teori maupun fokusnya. Persamaannya hanya pada metode penelitiannya, yaitu sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian Wulandari menyoroti budaya Minangkabau, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada budaya masyarakat daerah Jawa, khususnya sekitar Jawa Tengah. Selain itu, fokus utama penelitiannya juga berbeda. Kalau Wulandari menengahkan kajian sosiologi sastra, penelitian ini lebih memfokuskan pada stratifikasi sosial dalam karya sastra tersebut. Begitu pula dengan penelitian Pratiwi. Peneliti memfokuskan penelitian berdasarkan dua kriteria, yaitu stratifikasi sosial berdasarkan profesi dan tingkat pendidikan. Sebaliknya, penelitian ini menelaah stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan pada novel *Wasripin dan Satinah* karya Kuntowijoyo. Bukan hanya itu. Fokus penelitian ini juga membicarakan dampak stratifikasi sosial terhadap nasib tokoh Wasripin.

Terakhir, penelitian Melati adalah kajian sosiologi murni karena membahas dampak yang timbul di masyarakat akibat berdirinya PT Berdikari di suatu daerah. Ini tentu termasuk penelitian lapangan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Kebalikannya, penelitian ini lebih banyak akan mendeskripsikan peristiwa stratifikasi sosial yang terjadi di novel *Wasripin dan Satinah*. Bila di masyarakat suatu peristiwa atau perubahan merupakan peristiwa nyata, di dalam novel peristiwanya bisa fiktif belaka. Kejadian di dalam novel mungkin hanya rekaan pengarangnya. Meski demikian, peristiwa itu setidaknya dapat menjadi cermin bagi kehidupan di masyarakat nyata. Oleh karena itu, penelitian ini mengaitkan peristiwa yang terjadi di dalam novel dengan kondisi realistik di masyarakat. Apa yang termuat di dalam karya Kuntowijoyo ini setidaknya dapat dijadikan gambaran sekaligus pembelajaran yang berharga bagi masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Novel

Novel merupakan suatu karya sastra yang menceritakan tentang kehidupan tokoh-tokoh yang diciptakan oleh pengarang menjadi suatu cerita yang menarik. Novel merupakan cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Sudjiman (1984: 53), novel adalah prosa rekaan yang panjang dengan menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Novel sebagai karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia 10 yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajiner, yang dibangun oleh pengarang sebagai perwujudan atas apa yang ia pikirkan. Tokoh-tokoh dan latar yang disuguhkan pun merupakan gambaran kehidupan sehari-hari pengarang.

Novel memberikan gambaran kehidupan yang manusia yang luar biasa. Sebuah kehidupan yang dapat dijadikan sebagai cerminan bagi pembaca dalam mengambil pelajaran akan sikap hidup yang dikandungnya. Novel dibuat oleh pengarang dengan mengangkat cerita-cerita yang umum terjadi di kehidupan masyarakat baik yang bersifat menyedihkan atau menyenangkan, misalnya kisah percintaan, persahabatan, konflik dalam keluarga, dan lain sebagainya. Dalam novel muncul kejadian-kejadian yang membuat tokoh dalam cerita bisa bersikap bijaksana atau bisa mengambil sikap yang sesuai dalam menghadapi pertikaian yang akan merubah nasib mereka. Novel sebagai bagian dari karya sastra dan sebagai produk budaya menampilkan kahasanah budaya yang ada dalam masyarakat. Pengarang atau sastrawan tidak hanya menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, melainkan juga kearifan-kearifan yang dihadirkan dari hasil perenungan yang mendalam.

Goldman mendefinisikan novel sebagai cerita tentang yang terdegradasi akan nilai-nilai yang otentik yang dilakukan oleh hero yang problematik dalam sebuah dunia yang juga terdegradasi (dalam Faruk, 1994: 29). Hal senada juga

dijelaskan Attar Semi (1993: 2) yang menyatakan bahwa novel mengungkapkan suatu konsentrasi pada suatu saat tegangan dan pemusatan kehidupan yang tegas. Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek kehidupan manusia yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus. Selanjutnya, Henry Guntur Taringan (1984:164) juga mengatakan bahwa novel adalah suatu cerita dengan alur yang cukup panjang mengisi satu buku atau lebih yang menggarap kehidupan pria dan wanita yang bersifat imajinatif. Simpulan yang dapat diambil dari beberapa teori di atas bahwa novel merupakan karya prosa fiksi yang mengisahkan sebagian kehidupan manusia yang dianggap penting dalam beberapa episode kehidupan manusia dan di dalamnya terjadi perubahan kehidupan pelaku.

Simpulan yang dapat diambil dari beberapa teori di atas bahwa novel merupakan karya prosa fiksi yang mengisahkan sebagian kehidupan manusia yang dianggap penting dalam beberapa episode kehidupan manusia dan di dalamnya terjadi perubahan kehidupan pelaku.

2. Sosiologi Sastra

Pendekatan sosiologis terhadap sastra didasarkan bahwa ada kaitan antara sastra dengan masyarakat. Sosiologi dan sastra berurusan dengan hal yang sama yaitu manusia dalam masyarakat. Sosiologi adalah suatu telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat dan tentang sosial dan proses sosial. Sedangkan sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, bahasa itu merupakan ciptaan sosial yang menampilkan gambaran kehidupan (Semi, 1993:52). Sastra diwujudkan melalui bahasa yang kemudian ditulis menjadi karya sastra. Salah satu bentuknya yaitu novel.

Sastra memberikan gambaran kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan. Kehidupan mencakup hubungan antarmasyarakat, antar masyarakat dengan orang-seorang, antarmanusia, antarperistiwa yang terjadi pada seseorang (Damono, 1979:1). Gambaran kehidupan yang dihadirkan dalam sastra dapat memberikan kesan tertentu yang bermanfaat. Sastra dapat menimbulkan terjadinya peristiwa dan sikap sosial tertentu dalam masyarakat.

Sastra menampilkan kehidupan masyarakat dengan segala permasalahannya. Sastra tidak sekedar imajinansi yang dihasilkan oleh seorang pengarang. Peristiwa kehidupan dalam sastra yang diciptakan oleh pengarang bisa dianggap sebagai rekaman dari zamannya atau sastra dianggap sebagai cerminan kehidupan masyarakat.

Sastra dikaitkan dengan situasi tertentu, atau dengan sistem politik, ekonomi, dan sosial tertentu (Wellek dan Warren, 1990: 109). Melalui situasi sosial, sastra mencerminkan keadaan sosial yang terjadi pada saat sastra itu diciptakan. Sastra menyiratkan masalah sosial pada zamannya. Salah satu masalah sosial yaitu adanya strata-strata dalam masyarakat.

Sebuah teori sosial tentang masyarakat harus bisa memanfaatkan seluruh spektrum disiplin ilmu sosial agar mampu meneliti dengan tepat konflik yang sesungguhnya dari kekuatan-kekuatan dan relasi produksi. Masalah- masalah empiris, yang dijadikan fokus kerja sama di antara disiplin-disiplin ilmu khusus, digarap dengan mengaplikasikan filsafat sejarah kaum materialis bagi situasi kontemporer. Apabila kaum materialis menyatakan bahwa proses historis bergerak maju dengan suatu cara potensi rasio yang mewujud dalam kekuatan-kekuatan produksi adalah waktu yang dibebaskan dan konflik-konflik sosial maka pertanyaan yang diajukan adalah mekanisme-mekanisme apa yang dapat mencegah terjadinya konflik tersebut. Proses meningkatnya kesatuan kelas pekerja di dalam sistem masyarakat kapitalis maju sebagai kecenderungan perkembangan yang paling mengejutkan pada masanya. Inti teori kritik adalah teori yang sekaligus juga praktis. Ideologi yang diusung adalah emansipatoris dalam arti masyarakat yang ingin dibangun adalah masyarakat yang didalamnya terdapat manusia yang bebas, berdaulat, serta bebas dari penindasan (Haryanto 2012:241)

Dalam penelaahan sastra sebagai cermin masyarakat maka pandangan sosial harus diperhitungkan apabila menilai karya sastra sebagai cermin masyarakat. Sastra bisa mengandung gagasan yang mungkin dimanfaatkan untuk menumbuhkan sikap sosial tertentu-atau bahkan untuk mencetuskan peristiwa sosial tertentu (Damono, 1979: 2). Peristiwa sosial tersebut antara lain stratifikasi

sosial masyarakat yang juga bisa menumbuhkan sikap-sikap akibat dari adanya stratifikasi tersebut.

Adanya lintas disiplin antara sosiologi dan ilmu sastra sangat membantu peneliti yang ingin mengetahui historis serta budaya masyarakat yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Hal ini dikarenakan sosiologi sastra dapat membantu memahami kehidupan manusia. Sastra sebagai suatu lembaga menampilkan kehidupan tersebut dengan menggunakan bahasa, bahasa dalam kehidupan itu sendiri merupakan kenyataan sosial. Oleh karena itu, penelitian yang berhubungan dengan sastra dan masyarakat dapat ditempuh melalui sosiologi sastra.

3. Pengertian Stratifikasi Sosial

Stratifikasi berasal dari kata *stratum*, yaitu bentuk jamak dari *strata*, yang berarti lapisan. Sorokin (Basrowi, 2005:60) mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Dasar dan inti lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.

Stratifikasi sosial adalah pembedan masyarakat/penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat-tingkat. Pelapisan sosial terjadi pada semua kelompok masyarakat, baik yang maju maupun yang tradisional. Perbedaannya, pada masyarakat yang masih sederhana bentuk pelapisannya masih sederhana. Demikian sebaliknya, pada masyarakat yang sudah maju, pelapisan sosialnya sudah semakin kompleks. Pelapisan sosial sebenarnya sudah terjadi sejak manusia membentuk persekutuan antara yang satu dengan yang lain. (Triyono&Hermanto, 2017:50)

Pemahaman antara stratifikasi sosial dan kelas sosial sering disamakan, padahal di sisi lain pengertian antara stratifikasi sosial dan kelas sosial terdapat perbedaan. Penyamaan dua konsep pengertian stratifikasi sosial dan kelas sosial akan melahirkan pemahaman yang rancu. Stratifikasi sosial lebih merujuk pada pengelompokan orang kedalam tingkatan atau strata dalam heirarki secara vertical. Membicarakan stratifikasi sosial berarti mengkaji posisi atau kedudukan

antar orang/sekelompok orang dalam keadaan yang tidak sederajat. Adapun pengertian kelas sosial sebenarnya berada dalam ruang lingkup kajian yang lebih sempit, artinya kelas sosial lebih merujuk pada satu lapisan atau strata tertentu dalam sebuah stratifikasi sosial. Kelas sosial cenderung diartikan sebagai kelompok yang anggota-anggota memiliki orientasi politik, nilai budaya, sikap dan perilaku sosial yang secara umum sama.

Astried (2000: 25) menjelaskan bahwa stratifikasi sosial adalah hasil kebiasaan hubungan antarmanusia secara teratur dan tersusun sehingga setiap orang mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang secara vertikal maupun mendatar dalam masyarakatnya. Contoh pelapisan sosial berdasarkan bidang pekerjaan menurut keahlian, kecakapan, dan keterampilan, seperti pada sebuah perusahaan terdapat golongan elite, profesional, semi profesional, tenaga terampil, tenaga semi terampil, dan tenaga tidak terlatih.

Menurut Soekanto (dalam Narwoko, 2004: 152), di dalam setiap masyarakat di mana pun selalu dan pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai di masyarakat bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, status haji, status "darah biru" atau keturunan dari keluarga tertentu yang terhormat, atau apapun yang bernilai ekonomis. Di berbagai masyarakat sesuatu yang dihargai tidaklah selalu sama. Di lingkungan masyarakat pedesaan, tanah sewa dan hewan ternak sering kali dianggap jauh lebih berharga daripada gelar akademis, misalnya. Sementara itu, di lingkungan masyarakat kota yang modern, yang terjadi sering kali sebaliknya.

Stratifikasi sosial dan kelas sosial adalah dua hal yang berbeda, namun sering kali dipergunakan secara bergantian hingga dalam beberapa bagian menjadi rancu. Stratifikasi sosial sebetulnya lebih merujuk pada pembagian sekelompok orang ke dalam tingkatan atau strata yang berjenjang secara vertikal. Jadi, ketika kita berbicara tentang stratifikasi sosial, kita biasanya akan lebih banyak mengkaji ikhwal posisi yang tidak sederajat antar orang atau kelompok dalam masyarakat. Secara umum, stratifikasi sosial juga sering dikaitkan dengan persoalan kesenjangan atau polarisasi sosial. (Narwoko&Suyanto, 2004;169). Stratifikasi sosial lebih merujuk pada pengelompokan orang ke dalam tingkatan atau strata

dalam hierarki secara vertikal. Membicarakan stratifikasi sosial berarti mengkaji posisi atau kedudukan antar-orang atau kelompok orang dalam keadaan yang tidak sederajat (Setiadi dan Kolip, 2011:399).

Pada dasarnya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial terjadi karena adanya sesuatu yang dihormati dan dihargai dalam kehidupan masyarakat. Pembagian beberapa kelas (kelas atas, kelas menengah, kelas bawah) terjadi karena adanya ketimpangan dalam memberikan penghargaan. Golongan yang mendapatkan penghargaan yang tinggi akan menempatkan dirinya ke dalam kelompok masyarakat kelas atas. Golongan yang mendapatkan penghargaan yang sedang-sedang saja akan menempatkan dirinya ke dalam kelompok masyarakat kelas menengah. Selanjutnya, golongan yang mendapatkan penghargaan yang rendah akan menempatkan dirinya ke dalam kelompok masyarakat kelas bawah.

Stratifikasi sosial menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat dengan perwujudan yaitu adanya perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Perbedaan masyarakat tersebut didasarkan bahwa ada ketidakseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat (Sorokin dalam Syani, 1994:82). Jadi dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan penggolongan orang berdasarkan tingkatan atau strata yang ada dalam masyarakat.

4. Terjadinya Stratifikasi Sosial

Proses terbentuknya stratifikasi sosial dapat terjadi melalui dua cara, yaitu:

- (1) terjadi secara alamiah selaras dengan pertumbuhan masyarakat,
- (2) terjadi secara disengaja dan direncanakan manusia.

Stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah tidak dapat dilepaskan oleh kecenderungan bakat, minat, dan dukungan lingkungan. Misalnya, di lingkungan pantai berkembang masyarakat nelayan, di sekitar lahan yang subur berkembang masyarakat petani, dan banyak lagi contoh lain yang berhubungan dengan proses stratifikasi sosial secara alamiah. Adapun stratifikasi sosial yang sengaja direncanakan dan dibentuk oleh manusia dapat diperhatikan pada organisasi

politik seperti pembagian kekuasaan, pembentukan organisasi politik, penyusunan kabinet, dan lain sebagainya.

Seperti yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, bahwa terbentuknya stratifikasi sosial sangat terkait dengan nilai-nilai yang berharga dan terhormat. Standar nilai yang berharga dan terhormat berbeda-beda. Hal ini sangat tergantung dari sudut mana seseorang memandang. Namun demikian, secara umum standar nilai tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kriteria, yakni kriteria ekonomi, kriteria sosial, dan kriteria politik.

Terjadinya stratifikasi sosial atau sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pelapisan yang terjadi dengan sendirinya artinya tanpa disengaja, dan sistem pelapisan yang terjadi karena dengan sengaja disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Narwoko,2004:161)

Sifat dari sistem berlapis-lapisan dalam masyarakat ada yang tertutup dan terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dan lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya ke atas atau pun ke bawah. Keanggotaan dari lapisan tertutup, diperoleh melalui kelahiran. Sistem lapisan tertutup dapat dilihat pada masyarakat yang berkasta, dalam masyarakat yang feodal, atau pada masyarakat yang sistem pelapisannya ditentukan oleh perbedaan rasial. Pada masyarakat yang sistem pelapisannya bersifat terbuka, setiap anggota mempunyai kesempatan berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk naik lapisan sosial, atau kalau tidak beruntung, dapat jatuh ke lapisan di bawahnya. (Setiadi dan Kolip, 2011:401).

Weber (Faruk, 2010: 33) mengemukakan adanya tiga dasar yang berbeda dari stratifikasi sosial, yaitu dasar ekonomi yang melahirkan kelas-kelas sosial, dasar kultural yang membentuk status-status sosial, dan dasar politik yang membuahkan kelompok-kelompok kekuasaan. Stratifikasi sosial atas dasar ekonomi adalah stratifikasi sosial yang diukur dari perbedaan tingkat kepemilikan atau penguasaan atas sumber-sumber produktif. Stratifikasi sosial atas dasar budaya adalah stratifikasi sosial yang didasarkan pada ikatan subjektif para anggota dalam status sosial tertentu, kesamaan dalam gaya hidup mereka,

kesamaan dalam kebiasaan, dan juga keturunan. Stratifikasi sosial atas dasar politik berarti stratifikasi sosial yang dibangun atas dasar kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, memaksakan kehendak kepada orang lain meskipun terdapat perlawanan dari orang lain itu.

Setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, bisa berupa kepandaian, kekayaan, kekuasaan, profesi, keaslian keanggotaan masyarakat dan sebagainya. Selama manusia membedakan penghargaan yang dimiliki maka akan menimbulkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan, kecakapan masyarakat/seseorang terhadap sesuatu yang dihargai, semakin tinggi kedudukan atau lapisannya. Sebaliknya bagi mereka yang hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka mempunyai kedudukan dan lapisan yang rendah. Seorang pemimpin pasti menempati lapisan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan. Hal ini karena penghargaan terhadap jasa atau pengabdian ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi, misalnya pahlawan, pelopor, penemu, dan sebagainya. Selain itu, orang yang mempunyai keterampilan juga ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi pula, jika dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai keterampilan.

5. Jenis Stratifikasi Sosial

Sistem stratifikasi social diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem stratifikasi sosial tertutup dan sistem stratifikasi sosial terbuka.

a. Stratifikasi Sosial Tertutup (*Close Social Stratification*)

Sistem stratifikasi sosial dikatakan tertutup karena membatasi atau tidak memberi kemungkinan seseorang untuk pindah dari suatu lapisan ke lapisan sosial yang lainnya. Seseorang tidak bisa pindah ke strata atas maupun ke bawah. Satu-satunya jalan untuk agar menjadi anggota dari suatu strata tertentu dalam masyarakat adalah dengan kriteria kelahiran. Dengan kata lain, anggota kelompok dalam satu strata tidak mudah untuk melakukan bergerak yang bersifat vertikal, baik naik maupun turun. Anggota kelompok hanya dapat melakukan mobilitas yang bersifat

horizontal. Salah satu contoh sistem stratifikasi sosial tertutup adalah sistem kasta pada masyarakat Bali. Di Bali, seseorang yang sudah menempati kasta tertentu sangat sulit, bahkan tidak bisa pindah ke kasta yang lain. Seorang anggota kasta teratas sangat sulit untuk pindah ke kasta yang ada di bawahnya, kecuali ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota tersebut.

a. Stratifikasi Sosial Terbuka (*Open Social Stratification*)

Sistem stratifikasi sosial dikatakan terbuka karena memberi kemungkinan kepada seseorang untuk pindah dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Perpindahan itu terjadi sesuai dengan kecakapan, perjuangan, maupun usaha lain. Sistem ini memberikan rangsangan lebih besar kepada setiap anggota masyarakat, untuk dijadikan landasan pembangunan dari sistem yang tertutup. Masyarakat dengan sistem pelapisan sosial terbuka akan lebih mudah melakukan gerak mobilitas sosial, baik horizontal maupun vertikal. Semua itu sesuai dengan perjuangan dan pengorbanan seseorang untuk mencapai strata tertentu. Sistem stratifikasi sosial pada masyarakat terbuka didorong oleh beberapa faktor berikut ini.

1) Perbedaan Ras dan Sistem Nilai Budaya (Adat Istiadat)

Perbedaan ini menyangkut warna kulit, bentuk tubuh, dan latar belakang suku bangsa.

2) Pembagian Tugas (Spesialisasi)

Spesialisasi ini menyebabkan terjadinya perbedaan fungsi stratifikasi dan kekuasaan dalam suatu sistem kerja kelompok.

3) Kelangkaan Hak dan Kewajiban

Apabila pembagian hak dan kewajiban tidak merata, maka yang akan terjadi adalah kelangkaan yang menyangkut stratifikasi sosial di dalam masyarakat.

6. Fungsi Stratifikasi Sosial

Setidaknya terdapat enam fungsi stratifikasi sosial di masyarakat. Keenam fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Misalnya, penentuan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan dan wewenang pada jabatan/pangkat/kedudukan seseorang.
- b. Sistem pertanggaaan (tingkatan) pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestise dan penghargaan. Hal ini dapat dilihat pada seseorang yang menerima anugerah penghargaan/gelar/kebangsawanan, dan sebagainya.
- c. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang atau kekuasaan.
- d. Penentu lambang-lambang (simbol status) atau kedudukan, seperti tingkah laku, cara berpakaian dan bentuk rumah.
- e. Tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan.
- f. Alat solidaritas antarindividu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama di masyarakat.

7. Unsur Stratifikasi Sosial

Berdasarkan unsur-unsurnya, stratifikasi sosial dapat diklafisikasikan kedudukan (status) dan peranan (role).

a. Kedudukan (Status)

Kedudukan adalah posisi sosial yang ditempati seseorang dalam menjalankan berbagai kewajiban dan aktivitas. Ini sekaligus merupakan tempat bagi seseorang untuk menanamkan harapan-harapan. Dengan kata lain status merupakan posisi sosial seseorang dalam suatu hierarki. Terdapat lima kriteria penentuan kedudukan seseorang dalam masyarakat, yaitu kelahiran, mutu pribadi, prestasi, pemilikan, dan otoritas (Parsons, 2000: 105). Adapun Ralph Linton (2005: 78) membagi kehidupan masyarakat ke dalam tiga status, yaitu ascribed status, achieved status, dan assigned status.

1) *Ascribed Status*

Ascribed status diperoleh seseorang tanpa usaha tertentu. Status ini biasanya diperoleh karena warisan, keturunan, atau kelahiran. Contohnya

anak yang lahir dari lingkungan bangsawan. Secara otomatis, dia sudah memiliki status sebagai bangsawan.

2) *Achieved Status*

Status ini diperoleh karena suatu prestasi tertentu. Seseorang berusaha meraihnya dengan sengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan, tetapi bergantung pada kemampuan masing-masing dalam mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya seseorang dapat menjadi dokter setelah menyelesaikan kuliah di program studi kedokteran.

3) *Assigned Status*

Assigned status adalah status yang dimiliki seseorang karena jasanya terhadap pihak lain. Seseorang diberi status khusus oleh orang atau kelompok tersebut. Misalnya gelar pahlawan, adipura, pelopor, dan sebagainya.

b. Peran (Role)

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Dalam kehidupan di masyarakat, peran diartikan sebagai perilaku yang diharapkan pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status, dan tidak ada status tanpa peran. Interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran individu dalam masyarakat. Ada tiga hal yang tercakup dalam peran, yaitu sebagai berikut.

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Setiap manusia mempunyai status atau kedudukan dan peran sosial tertentu sesuai dengan struktur sosial dan pola-pola pergaulan hidup di masyarakat. Dalam setiap struktur, ia memiliki kedudukan dan menjalankan

perannya sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan dan peran mencakup tiap-tiap unsur dan struktur sosial. Jadi, kedudukan dan peran menentukan perbuatan seseorang di masyarakat.

8. Dasar Ukuran Stratifikasi Sosial

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam bukunya “Setangkai Bunga Sosiologi” menyatakan bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, maka dengan sendirinya pelapisan sosial akan terjadi. Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial adalah ukuran kekayaan, kekuasaan dan wewenang, kehormatan, serta ilmu pengetahuan. Dasar yang biasa digunakan untuk menggolongkan suatu masyarakat menurut stratifikasi sosial atau pelapisan sosial antara lain adalah sebagai berikut:

a. Ukuran Kekayaan

Kekayaan merupakan dasar yang paling banyak digunakan dalam pelapisan sosial masyarakat. Seseorang yang mempunyai kekayaan banyak akan dimasukkan ke lapisan atas dan yang mempunyai kekayaan sedikit akan dimasukkan ke lapisan bawah (Basrowi,2005;62). Materi atau kebendaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat salah satunya pada bentuk tempat tinggal. Pada dasarnya pembentukan pelapisan sosial diukur dari kekayaan atau orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang saling berkaitan. Contoh yang mudah kita amati adalah bila orang kaya atau mempunyai jabatan kebanyakannya mempunyai rumah yang mewah terbuat dari beton, sedangkan sebaliknya orang yang mempunyai pekerjaan biasa-biasa saja biasanya mempunyai rumah yang sederhana terbuat dari papan. Dari hal itu saja jelas sekali terlihat stratifikasi sosial sudah terjadi karena bentuk rumah

yang mewah itulah menjadi sebuah gengsi bagi pemiliknya karena dinilai berada di kelas sosial tinggi.

Kekayaan materi atau kebendaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, barang siapa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan orang Lubai dapat dilihat antara lain pada bentuk Rumah tempat tinggalnya; benda-benda tersier seperti kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, lahan pertanian kebun Karet yang dimilikinya, cara berpakaian, memakai busana yang mahal, mau pun kebiasaannya dalam berbelanja untuk keperluan hidup sehari-hari.

Orang besar memiliki kekayaan, tetapi ia tidak akan mendapatkan kedudukannya tersebut dengan menimbun harta. Mereka akan mendapat prestise dengan kedermawanan membagi-bagikan harta tersebut. Mereka yang lebih suka menimbun harta daripada membagi-bagikannya sangat tidak disukai. Dengan demikian, masyarakat bertingkat ini menolak perbedaan keuntungan material, dan mereka selalu mencegah sedini mungkin setiap perkembangan ke arah tersebut. Dalam hal ini, sistem rangking berusaha menciptakan kesejahteraan umum (dengan aktivitas redistribusi oleh individu yang mempunyai kedudukan tinggi) sekaligus mencegah terbentuknya strata sosial karena perbedaan pendapatan (Sanderson, 1993:150).

Potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang memang berbeda-beda. Ada sebagian orang yang potensial tetapi tidak pernah memperoleh kesempatan untuk maju. Ada sebagian orang yang memiliki kesempatan yang sangat luas untuk maju sehingga memperoleh kesuksesan dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari dapat diamati bahwa pencapaian, penguasaan, dan kepemilikan seseorang dalam bidang ekonomi sangat bervariasi.

Variasi inilah yang telah memunculkan kelas-kelas ekonomi (economic classes) tertentu dalam kehidupan masyarakat. Tolak ukur kelas ekonomi

(*economis classes*) adalah seberapa banyak seseorang memiliki pendapatan dan/atau kekayaan. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) lapisan masyarakat dipandang dari sudut ekonomi, yaitu: kelas atas (*upper class*), kelas menengah (*middle class*), dan kelas bawah (*lower class*). Masyarakat kelas atas (*upper class*) merupakan kelompok orang kaya yang diliputi dengan kemewahan. Masyarakat kelas menengah (*middle class*) merupakan kelompok orang yang berkecukupan, yakni mereka yang berkecukupan dalam hal kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan masyarakat kelas bawah (*lower class*) merupakan sekelompok orang miskin yang sering mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Segala sesuatu yang menyangkut kepemilikan benda-benda berharga atau aset produksi seseorang atau keluarga. Adapun benda-benda berharga yang dikategorikan sebagai aset ekonomi yang beragam. Dalam struktur masyarakat agraris tentunya sawah atau lahan pertanian menjadi ukuran kekayaan seseorang, berbeda dengan struktur masyarakat perkotaan yang memiliki mobil mewah, rumah mentereng, benda-benda elektronik akan menjadi ukuran kepemilikan kekayaan. Selain kepemilikan jumlah benda-benda berharga juga dapat dilihat berapa jumlah orang-orang yang mengerjakan alat-alat produksi seseorang. Jika struktur masyarakat yang ada lebih berorientasi pada sektor agraris tentunya makin luas lahan pertanian dan perkebunan akan memerlukan investasi yang lebih besar dibanding dengan sekelompok petani yang memiliki lahan garapan yang sempit. Demikian juga, di dalam masyarakat industri dan perdagangan. Skala investasi di dalam dunia usaha atau bisnis yang dijalankan akan menentukan strata sosialnya di dalam masyarakat. (Setiadi dan Kolip, 2013:405)

Status sosial berdasarkan kriteria ekonomi ini bersifat terbuka, dalam arti, siapapun orangnya dapat menempati kelas sosial tertentu, baik kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah, tergantung dari kemampuan orang tersebut dalam bekerja dan memperoleh kekayaan. Orang kaya sewaktu-waktu dapat mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin. Sebaliknya, tidak mustahil orang

miskin dapat mengubah nasibnya menjadi orang kaya asal bersedia bekerja keras dan hidup hemat.

Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, maka ia termasuk dalam lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, barang siapa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaianya, maupun kebiasaanya dalam berbelanja.

Satria (2002: 52) menjelaskan bahwa masyarakat nelayan dapat dibagi menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik atau juragan adalah orang yang memiliki sarana penangkapan, seperti kapal/perahu, jaring, dan alat tangkap lainnya. Sementara nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, atau sering kita sebut sebagai anak buah kapal (ABK).

Pollnac (*dalam* Satria, 2002:58) membedakan nelayan ke dalam dua kelompok; nelayan besar (*large scale fisherman*) dan nelayan kecil (*small scale fisherman*). Pembedaan ini berdasarkan respon untuk mengantisipasi tingginya risiko dan ketidakpastian. Melihat bahwa pengelompokan Pollnac kurang memadai untuk konteks negara berkembang seperti Indonesia, Satria (2002) menggolongkan nelayan menjadi empat tingkatan yang dilihat kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar, dan karakteristik hubungan produksi.

Pertama, *peasant fisher* atau nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsistence*) dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha. Umumnya mereka menggunakan alat tangkap tradisional dayung atau sampan tidak bermotor dan masih melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.

Kedua, dengan berkembangnya motorisasi perikanan, nelayan pun berubah dari *peasant fisher* menjadi *post-peasant fisher* yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor itu semakin membuka

peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih jauh dan memperoleh surplus dari hasil tangkapan itu karena mempunyai daya tangkap lebih besar. Umumnya, nelayan jenis ini masih beroperasi di wilayah pesisir. Pada jenis ini, nelayan sudah berorientasi pasar. Sementara itu, tenaga kerja atau ABK-nya sudah meluas dan tidak bergantung pada anggota keluarga saja.

Ketiga adalah *commercial fisher*, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah besar yang dicirikan dengan banyaknya tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajer. Teknologi yang digunakanpun lebih modern dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun alat tangkapnya. Contohnya nelayan *purse seine* di Pekalongan.

Keempat adalah *industrial fisher* yang pengertiannya dapat mengacu pada Pollnac, yaitu: a) diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara-negara maju; b) secara relatif lebih padat modal; c) memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu; dan d) menghasilkan ikan untuk kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.

Nelayan skala besar dicirikan dengan majunya kapasitas teknologi penangkapan maupun jumlah armadanya. Mereka lebih berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan buruh nelayan sebagai ABK dengan organisasi kerja yang kompleks.

b. Ukuran Kehormatan

Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya, para orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya yang mendapat tempat teratas

adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. Demikian juga para pemimpin agama, mereka akan dihormati oleh umatnya, bahkan perilakunya dijadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para rohaniawan secara umum berada pada lapisan atas karena kehormatan. (Triyono, 2017:51)

Max Weber (Setiadi dan Kolip, 2011:408) dalam bentuk sederhana, ia juga membagi stratifikasi atas dasar status masyarakat ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang disegani atau dihormati dan kelompok masyarakat biasa. Biasanya kelompok masyarakat yang terhormat ini menekankan arti pentingnya akar sejarah yang dijadikan dasar pembenaran mengapa kelompok mereka memiliki kedudukan yang istimewa di dalam masyarakat.

Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur, dapat diukur dari gelar kebangsawanan atau dapat pula diukur dari sisi kekayaan materiil. Orang yang mempunyai gelar kebangsawanan yang menyertai namanya, seperti raden, raden mas, atau raden ajeng akan menduduki strata teratas dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang terhormat ini, mereka biasanya selalu menekankan arti penting akar sejarah yang dijadikan dasar untuk membenarkan kenapa mereka pantas memiliki kedudukan istimewa di masyarakat. Seorang keturunan bangsawan, misalnya akan tampil terhormat di masyarakat, dan dalam beberapa hal enggan masuk atau dimasuki kelompok rakyat biasa karena adanya keinginan untuk mempertahankan kemurnian darahnya kebangsawannya. Kelompok masyarakat yang menduduki posisi terhormat, biasanya gaya hidup eksklusif. Di bidang pergaulan hidup sehari-hari hal itu mungkin diwujudkan dalam bentuk pembatasan terhadap pergaulan erat dengan orang yang statusnya lebih rendah (Sanderson, 1993:284).

c. Ukuran Kekuasaan

Kekuasaan dan wewenang adalah dua hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Dikatakan oleh Soekanto (dalam Syani, 1994:136) bahwa kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Di sini terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kekuasaan dan kewenangan. Jika setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dinamakan kekuasaan, maka kewenangan lebih menekankan pada legalitas dari pengaruh yang ada pada diri seseorang atau sekelompok orang tersebut (Setiadi dan Kolip, 2011:746). Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan.

Menurut Weber (dalam Narwoko, 2014:174) yang dimaksud dengan kekuasaan adalah peluang bagi seseorang atau sejumlah orang untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri melalui tindakan komunal meskipun mengalami tentangan dari orang lain yang ikut serta dalam tindakan komunal itu. Setiap masyarakat selalu terdapat dua kelas penduduk: satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama, yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, menempati lapisan atasan. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kekuasaan dapat pula tumbuh dari adanya kepercayaan khalayak terhadap seseorang yang didasarkan pada tradisi, kesucian atau atas dasar adat istiadat masyarakat. Pada dasarnya usaha mempertahankan kekuasaan terletak pada

kemantapan hukum yang mengikat kekuatan penguasa dalam menanamkan keyakinan akan fungsi kepatuhan.

Adapun wewenang erat hubungannya dengan kekuasaan; dengan wewenang berarti seseorang mempunyai hak untuk melakukan dan menetapkan sesuatu. Jadi wewenang menekankan pada unsur hak, bukan pada kekuasaannya, meskipun kekuasaan dan wewenang tidak bisa dipisahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang disebabkan oleh adanya dimensi-dimensi kekuasaan yang melekat pada diri seseorang tersebut.

Dari uraian di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa struktur sosial merupakan suatu susunan dalam masyarakat yang berguna untuk menunjukkan sebuah keteraturan sosial yang di dalamnya terdapat hubungan-hubungan sosial antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Franz magnis (2003: 39) menyebutkan bahwa kekuasaan akan tetap jika memiliki legitimasi yang dimaksud dibagi dalam tiga kategori, yakni:

- 1) Legitimasi legalitas, kekuasaan diakui secara hukum; di dapat sesuai prosedur hukum.
- 2) Legitimasi demokratis, kekuasaan negara harus mendapat pengakuan dari seluruh rakyat.
- 3) Legitimasi normatif, menitikberatkan kekuasaan secara etis dan moralitas.

Bentuk legitimasi kekuasaan yang banyak dipakai oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia adalah legitimasi legalitas. Negara berhak melakukan tindakan apa pun (kekuasaan) karena sesuai dengan aturan/hukum. Legalitas adalah salah satu kriteria bagi keabsahan wewenang dan menuntut agar semua wewenang (kekuasaan) dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu tindakan dianggap sah karena sesuai dengan hukum dan dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum.

Menurut Lasswell (2009: 54), kekuasaan adalah suatu bentuk pelaksanaan pengaruh yang khusus, proses pendekatan kebijakan-kebijakan pihak lain dengan bantuan (yang aktual ataupun ancaman) penyitaan-penyitaan yang

kasar bagi ketidaksepakatan atas kebijakan-kebijakan yang ditujukan. Ilmu politik membicarakan kekuasaan secara umum dengan semua bentuk di mana semua hal itu terjadi. Kekuasaan politik merupakan suatu istilah yang kompleks yang selalu berkaitan dengan bentuk kekuasaan yang lain seperti kemakmuran, dan persenjataan. Kekuasaan sebagai sesuatu yang idealis.

Dalam pandangan teori konflik, struktur dalam masyarakat hanya menimbulkan penindasan dari superordinat terhadap subordinat, melahirkan ketidakadilan, ketidakmerataan, dan konflik. Oleh karena itu, struktur tidak diperlukan, termasuk juga keluarga. Keluarga dapat menjadi modal sosial dalam mengantisipasi konflik yang mengakibatkan kekerasan dan kerusuhan sosial.

Koentjaningrat (1984) mengelompokkan konflik ke dalam 4 macam :

- 1) Konflik batin atau *mental conflict* (gagasan dan keinginan dalam diri individu)
- 2) Konflik kebudayaan atau *cultural conflict* (persaingan antara warga dalam kolektif sosial yang mempunyai kebudayaan yang hampir seragam. Persaingan berlangsung berdasarkan perbedaan-perbedaan khusus pada unsur-unsur kebudayaan yang hampir seragam itu untuk memperbesar identitas kolektif sosial sendiri).
- 3) Konflik kelas atau *class conflict* (pertentangan antara golongan dalam masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan)
- 4) Konflik peran *role conflict* (peranan atau peranan-peranan yang dipegang oleh seseorang individu yang dilaksanakan secara tidak konsisten)

Di dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya aturan hukum agar potensi konflik tersebut tereliminasi. Bila tidak, tentu dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Kedamaian, kerukunan, kesepakatan, saling tenggang rasa, satu hati dalam perbedaan harus diwujudkan dalam kesepakatan dalam perbedaan etnis, agama; kekuasaan, dan sebagainya.

Konflik sosial muncul ketika dua orang atau kelompok atau lebih menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang berbeda. Menurut Soerjono dalam Darwin (2005:25), konflik adalah suatu proses terjadinya

pertentangan, kekuasaan, kedudukan, dan seterusnya, di mana salah satu pihak berusaha menghancurkan pihak lain. Robbin *dalam* Darwin (2005: 30), memberikan definisi konflik secara lebih luas, yaitu konflik dikatakan sebagai suatu proses yang dimulai tatkala suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepadanya atau tatkala suatu pihak merasa kepentingannya itu memberikan pengaruh negatif kepada pihak lain. Dalam pengertian tersebut, wujud konflik mencakup rentang yang amat luas: mulai dari ketidaksetujuan yang samar-samar, sampai dengan tindakan kekerasan. Pendek kata setiap perbedaan itu merupakan potensi konflik, yang jika tidak ditangani secara baik, potensi konflik itu bisa berubah menjadi konflik terbuka.

Pertentangan antara kelas buruh dan kelas majikan lebih disebabkan kepentingan dua kelas itu, yaitu antara penguasa dan yang dikuasai. Majikan berkepentingan untuk mengusahakan laba sebanyak-banyaknya dengan menekan biaya tenaga kerja buruh, sebaliknya buruh berkepentingan untuk mendapat upah sebanyak-banyaknya. Perbedaan kepentingan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau perubahan sikap, tetapi melalui perubahan struktur kekuasaan. Kelas atas tidak mungkin merelakan peranannya, sehingga sebuah perubahan sistem sosial hanya dapat diakhiri dengan jalan kekerasan melalui revolusi. Kondisi ini akan mengancam posisi kelas atas sehingga mereka cenderung bersikap konservatif, sedangkan kelas bawah akan bersifat progresif dan revolusioner. Akibatnya, kelas atas berusaha mempertahankan *status quo* untuk menentang segala perubahan dalam struktur kekuasaan.

d. Ukuran Pendidikan

Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor

ataupun gelar profesional seperti profesor. Namun, sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kejarjanaan, misalnya dengan membeli skripsi, menyuap, ijazah palsu dan seterusnya. Dasar ini dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, walaupun kadang-kadang masyarakat salah persepsi karena hanya meninjau dari gelar seseorang. (Basrowi, 2005:63)

Ilmu pengetahuan dipakai sebagai ukuran stratifikasi sosial pada masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Ukuran untuk menentukan lapisan sosial masyarakat di atas bukanlah ukuran mutlak yang tidak bisa berubah. Masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial seseorang dalam masyarakat. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kejarjanaan), atau profesi yang disandang seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor, ataupun gelar profesional seperti profesor (dalam Soekanto, 2005: 237-238).

Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Pada zaman dahulu keturunanlah yang menentukan status sosial seseorang yang sukar ditembus karena sistem golongan yang ketat, namun sekarang tanpa keturunan yang baikpun seseorang dapat melakukan mobilitas sosial yang diantaranya adalah melalui pendidikan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran, dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan (Tharaba, 2016: 146).

Jenjang kependidikan seseorang biasanya mempengaruhi status sosial seseorang di dalam struktur sosialnya. Maka tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh kepada pola-pola kehidupan orang tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang berpendidikan tinggi hingga bergelar Doktor tentunya akan berstatus lebih tinggi dibanding dengan seseorang yang lulusan SD. Jenjang pendidikan ini biasanya berpengaruh pada mobilitas sosial serta jabatan seseorang dalam suatu lembaga pekerjaan (Kolif, 2011:432).